

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENURUNAN *STUNTING* DI KELURAHAN KEDUNG BARUK KOTA SURABAYA

Virda Devy Dwi Alviyanti¹, Rachmawati Novaria², Adi Soesiantoro³
Administrasi Negara, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni 2024

Revised Juni 2024

Accepted Juni 2024

Available online Juni 2024

Email:

virda.alviyanti@gmail.com

[m](https://orcid.org/0000-0000-0000-0000)



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Abstrak

Stunting merupakan kondisi anak usia di bawah lima tahun (balita) yang memiliki tinggi badan dibawah rata-rata balita pada umumnya. Angka prevalensi stunting di Indonesia masih melebihi batas normal yang ditetapkan oleh World Health Organization (WHO) yaitu sebesar 24,4 persen atau 5,33 juta balita mengalami stunting pada tahun 2021. Kelurahan Kedung Baruk merupakan satu dari kelurahan yang ada di Surabaya menjalankan kebijakan penurunan Stunting. Karena pada tahun 2021 di Kelurahan Kedung Baruk terdapat 23 balita mengalami stunting. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kesesuaian aspek organisasi, interpretasi, dan penerapan dalam implementasi kebijakan penurunan stunting di Kelurahan Kedung Baruk Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penurunan

stunting di Kelurahan Kedung Baruk belum dilaksanakan dengan baik dan optimal dengan tiga pilar keberhasilan implementasi menurut Jones (1996) organisasi, interpretasi dan penerapan. Organisasi yang berperan dalam implementasi belum berjalan dengan baik karena belum adanya SOP (standar operasional prosedur) dan pedoman kinerja serta adanya rangkap jabatan dalam percepatan penurunan stunting. Interpretasi kebijakan penurunan stunting di Kedung Baruk telah sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Surabaya. Namun pemahaman masyarakat dan pelaksana kebijakan masih kurang tentang stunting. Penerapan kegiatan penurunan stunting telah dilakukan dengan baik dan rutin namun dalam pelaksanaannya tim percepatan penurunan stunting / TPPS Kelurahan Kedung Baruk tidak mengetahui adanya pedoman kinerja. Faktor pendukung implementasi penurunan stunting di Kedung Baruk adalah Kader Surabaya Hebat, bantuan susu dan vitamin dari Pemerintah Kedung Baruk dan Puskesmas dan alat pendukung yang telah tersedia. Faktor penghambat adalah keterbatasan sumber daya manusia dan finansial, kurangnya pengetahuan anggota tim tentang pedoman kinerja.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Penurunan stunting

PENDAHULUAN

Stunting merupakan kondisi anak usia di bawah lima tahun (balita) yang memiliki tinggi badan dibawah rata-rata balita pada umumnya. Balita dikategorikan *stunting* apabila panjang badan atau tinggi badannya lebih dari minus dua standar di bawah median standar pertumbuhan anak dari WHO (World Health Organization). *Stunting* disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, dan kurangnya asupan gizi pada bayi. *Stunting* jika tidak segera diatasi maka akan berpotensi menyebabkan perkembangan otak melambat, keterbelakangan mental, dan rendahnya kemampuan belajar (Kementerian Kesehatan, 2018). Angka prevalensi *stunting* di

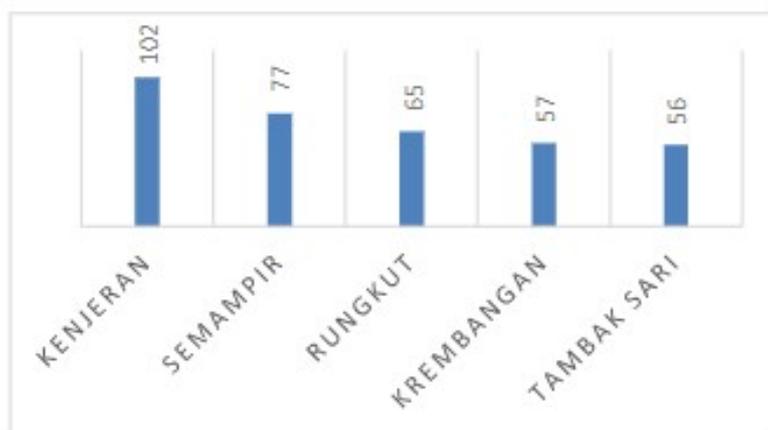
Indonesia masih melebihi batas normal yang ditetapkan oleh World Health Organization (WHO) sebesar 20%. Berdasarkan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) untuk tahun 2020 angka *stunting* di Indonesia mencapai 26,92, dan tahun 2021 sebesar 24,4% (Kementerian Sekretariat Republik Indonesia, 2021).

Menyikapi hal tersebut, Presiden Jokowi dalam membuka musrenbangnas RPJMN 2020-2024 menargetkan penurunan *stunting* untuk lima tahun kedepan di angka 14%. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target tersebut dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, dimana dalam penyelenggaraannya dilaksanakan melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa dan pemangku kepentingan untuk mempersiapkan generasi emas 2045.

Kota Surabaya sendiri memiliki *stunting* sebesar 4,8%. Angka ini merupakan yang terendah di wilayah Jawa Timur. Pemerintah kota Surabaya turut serta dalam penanganan permasalahan *stunting* oleh karena itu diterbitkannya Peraturan Wali Kota (Perwali) No 79 tahun 2022 terkait percepatan penurunan *stunting* di Surabaya, Dilansir dari surabaya.go.id, jumlah balita *stunting* cukup tinggi pada tahun 2020 terdapat 12.788 dan pada tahun 2021, prevalensinya mencapai 28,9 persen (6.722 balita), sementara di 2022 signifikan menurun hingga ke angka 4,8 persen (923 balita). Pemerintah kota Surabaya terus fokus untuk menurunkan prevelensi angka *stunting* dengan mengadakan berbagai program dari hulu hingga hilir Surabaya zero (nol kasus) *stunting*, akan tetapi pemkot juga berusaha keras untuk zero new (nol kasus baru) *stunting*. Untuk mengejar zero *stunting* pada tahun 2023-2024, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta Camat dan Lurah agar melibatkan stakeholder dan masyarakat sekitar. Melalui intervensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Surabaya, pola gotong-royong dalam menangani bayi *stunting*. Eri Cahyadi selaku Walikota Surabaya memberikan arahan agar seluruh wilayah di Kota Surabaya menjalankan kebijakan penurunan *stunting*.

Penelitian berfokus pada lingkup tingkat kelurahan karna kebijakan dari pemerintah kota surabaya untuk menmfokuskan penyelesaian permasalahan *stunting* ke lingkup yang lebih kecil agar fokus penyelesaian *stunting* lebih cepet teratasi.

Meskipun penurunan *stunting* terus berjalan di Kota Surabaya sendiri terdapat beberapa kecamatan dengan kasus *stunting* yang masih tinggi (berita per September, 2022), diantaranya:



Grafik 1. Kecamatan Dengan Prevalensi Angka *Stunting* Tertinggi di Kota Surabaya

Sumber: Jawapos.com, 2022.

Berdasarkan grafik di atas 5 Kecamatan dengan jumlah balita *stunting* tinggi salah satunya di kecamatan Rungkut yaitu 65 balita. Kelurahan Kedung Baruk merupakan salah satu kelurahan di kecamatan Rungkut Kota Surabaya yang tengah menjalankan kebijakan penurunan *stunting*. Kebijakan penurunan *stunting* telah diimplementasikan di berbagai wilayah, termasuk Kelurahan Kedung Baruk. Namun, penting untuk menganalisis sejauh mana kebijakan berjalan apakah terlaksana efektif dan optimal dalam menangani masalah *stunting* di wilayah ini.

Hasil observasi awal penelitian angka *stunting* di Kelurahan Kedung Baruk masih tinggi dan sempat mengalami kenaikan. Pada tahun 2021 berjumlah 23 balita mengalami *stunting* lalu turun menjadi 17 di tahun 2021, kemudian bulan oktober 2022 mengalami penurunan lagi menjadi 11, dan di tahun 2023 berjumlah 8 balita *stunting* di wilayah Kelurahan Kedung Baruk. Dan di observasi awal penelitian menemukan masih terdapat hambatan sehingga proses penyelesaiannya kurang efektif dan cukup lama dalam prosesnya. Peneliti memilih Lokasi tersebut atas rekomendasi Pemerintah kota Surabaya berdasarkan tingkat tingginya indikator *stunting*, terutama kelurahan yang merupakan lokus *stunting* dengan kasus *stunting* yang masih tinggi di kota Surabaya.

Dalam rangka mencapai tujuan penurunan *stunting* dan perbaikan kesehatan anak-anak di Kelurahan Kedung Baruk, sangat penting untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan penurunan *stunting*. Analisis pelaksanaan kebijakan penurunan *stunting* di ini dapat membantu mengidentifikasi potensi perbaikan dalam pelaksanaan program, serta mencari solusi yang lebih efektif untuk menangani *stunting* di tingkat kelurahan. Untuk menganalisis implementasi program maka peneliti menggunakan teori Implementasi Charles O. Jones (1984).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif. Metode ini dipilih untuk menggambarkan peristiwa atau fenomena yang sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi kebijakan penurunan *stunting* di Kelurahan Kedung Baruk kota Surabaya. Data yang dikumpulkan adalah kata-kata dari wawancara, dokumen pribadi, gambar, catatan lapangan dan foto. Metode kualitatif menggambarkan suatu fenomena yang ada dengan menyajikan data berupa kata-kata, gambar dan bukan angka (Moleong, 2017). Penelitian ini berusaha menggambarkan tentang implementasi kebijakan penurunan *stunting* di Kelurahan Kedung Baruk. Penulis dalam penelitian ini menggunakan penelitian jenis deskriptif. Data yang dihasilkan dari penelitian deskriptif adalah kata-kata, gambar dan bukan bentuk angka-angka yang diperoleh melalui wawancara dan observasi (Abdussamad, 2021).

Fokus penelitian berguna membatasi penelitian sehingga memudahkan peneliti untuk memilih data yang relevan dalam penelitian. Pembatasan ini didasarkan pada urgensi atau tingkat kepentingan dari masalah yang dihadapi (Sugiyono, 2012). Fokus dari penelitian ini yaitu:

Tahap-tahap implementasi kebijakan menurut Jones (1984)

- a. Organisasi yang terlibat dalam penurunan *stunting* di Kelurahan Kedung Baruk yang mencakup tentang:
 1. Sumber daya yang mendukung dalam implementasi kebijakan penurunan *stunting*. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya finansial dan alat pendukung. Sumber daya manusia meliputi aktor yang

- terlibat dalam penurunan *stunting* yang termuat dalam Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kelurahan Kedung Baruk. Sumber daya finansial meliputi anggaran yang dikeluarkan Pemerintah Kota dalam penurunan *stunting* untuk melihat kesesuaiannya dengan kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah kota Surabaya dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2022. Serta ketersediaan alat pendukung yang dipergunakan dalam penurunan *stunting* di wilayah Kelurahan Kedung Baruk
2. Struktur organisasi dalam Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kelurahan Kedung Baruk apakah sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2022. Untuk melihat apakah dalam Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kelurahan Kedung Baruk telah melakukan pembagian tugas dan fungsi dalam penurunan *stunting* di Kedung Baruk.
 3. Metode dalam penyampaian informasi kegiatan penurunan *stunting* kepada masyarakat Kedung Baruk dan inovasi kegiatan yang dilakukan oleh Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kelurahan Kedung Baruk.
- b. Interpretasi yang dilakukan oleh Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kelurahan Kedung Baruk kepada masyarakat mengenai pemahaman tentang *stunting*. Untuk melihat bentuk komunikasi antar anggota tim.
 - c. Penerapan kegiatan penurunan *stunting* berdasarkan pedoman kinerja dan jadwal kegiatan.

Lokasi penelitian ini, peneliti memilih lokasi di Kelurahan Kedung Baruk Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. Alasan memilih lokasi tersebut berdasarkan hasil observasi awal peneliti pada saat saya magang dulu tercatat banyaknya balita yang mengalami *stunting* dan ada beberapa balita *stunting* yang belum dinyatakan bebas *stunting*.

Sumber data menurut Siyoto (2015:28) Data primer adalah data yang diperoleh dari responden atau informan melalui kuesioner, observasi atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari pendapat para ahli serta informasi yang berhubungan dengan pokok permasalahan sebagai data awal untuk mendukung data primer. Data yang diperoleh dapat berasal dari dokumen yang ada di lokasi penelitian, jurnal, artikel ataupun dari sumber literatur lain.

Wiliam Wiersma (1986) dikutip dari (Sugiyono, 2017:273) mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dari beberapa waktu. Triangulasi Sumber adalah Mengecek data yang diperoleh dari berbagai sumber untuk memastikan kebenarannya. Triangulasi Teknik artinya peneliti membandingkan data dari sumber yang sama, tetapi menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda, untuk menguji keandalan data. Triangulasi Waktu artinya melakukan pengujian validitas data dengan melakukan wawancara, observasi, atau prosedur lain pada waktu yang berbeda, untuk melihat konsistensi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kebijakan penurunan *stunting* di lingkup Kelurahan Kedung Baruk diawali dengan ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Di Kota Surabaya. Menyikapi hal tersebut, Lurah menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* dan Surat Keputusan Lurah Kelurahan Kedung Baruk Nomor 188.45/202/436.9.18.2/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kelurahan Kedung Baruk berisi tentang tugas pokok dan fungsi tim Percepatan

Penurunan *Stunting* (TPPS) Kelurahan Kedung Baruk. Kelurahan Kedung Baruk menjadi salah satu kelurahan yang melaksanakan kebijakan percepatan penurunan *stunting*, hal tersebut karena pada tahun 2021 prevalensi *stunting* di Kelurahan Kedung Baruk tinggi yakni sebanyak dua puluh tiga balita *stunting*. Oleh karena itu, peneliti ingin melihat bagaimana proses implementasi kebijakan penurunan *stunting* di Kelurahan Kedung Baruk yang ditinjau berdasarkan teori menurut Jones (1984).

1. Organisasi

Menurut Jones (1984), keberhasilan implementasi kebijakan memerlukan keterlibatan organisasi yang menjalankan kebijakan tersebut. Organisasi ini harus mengelola sumber daya, unit, dan metode untuk menjalankan program sesuai standar dan mencapai hasil yang diinginkan.

a. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan publik, mencakup sumber daya manusia, sarana prasarana, dan finansial. Di Kelurahan Kedung Baruk, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran menghambat penurunan *stunting*. Kader dan bidan aktif membantu, tetapi tumpang tindih peran kader menyebabkan ketidakefektifan. Anggaran yang terbatas dan dicairkan bertahap menyebabkan keterlambatan honorarium dan bantuan, meskipun beberapa fasilitas seperti alat posyandu dan perangkat administrasi tersedia.

b. Struktur Organisasi

Jones (1984) menyatakan struktur organisasi harus formal dengan aturan dan tugas yang jelas. Di Kelurahan Kedung Baruk, Tim Percepatan Penurunan *Stunting* dibentuk tetapi masih kurang aktif karena kurang inisiatif dan pengetahuan tugas, serta ketiadaan standar operasional prosedur (SOP).

c. Metode

Metode implementasi kebijakan harus sesuai pedoman dan standar. Di Kelurahan Kedung Baruk, informasi disebarluaskan melalui WhatsApp dan media sosial untuk efisiensi. Tim juga mendatangi rumah balita *stunting* untuk penyuluhan dan penimbangan, memastikan data tetap terupdate dan anak mendapat penanganan yang diperlukan.

Secara keseluruhan pilar organisasi pelaksana kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kelurahan Kedung Baruk masih belum terlaksana dengan maksimal. Terdapat indikator yang belum berjalan dengan baik yaitu sumber daya dan pembagian tugas yang baik sesuai dengan struktur organisasi serta tidak adanya standar operasional prosedur. Kurangnya sumber daya manusia, terbatasnya dana. Dalam implementasi kebijakan dapat menjadi salah satu faktor sumbu besar dalam gagalnya proses implementasi kebijakan (Ponto, Pioh, & Tasik, 2016). Masih perlu perbaikan dalam pemahaman tugas antar anggota agar semua sumber daya organisasi dapat menjalankan tugas dan tupoksi sesuai dengan bidangnya dalam percepatan penurunan *stunting* di Kelurahan Kedung Baruk. Keterbatasan anggaran juga menjadi faktor penghambat yang perlu ditangani mengingat Kelurahan Kedung Baruk memiliki Permasalahan *stunting* namun tidak diiringi dengan dana yang memadai. Hal tersebut menghambat proses percepatan penurunan *stunting* terutama dalam pembagian bantuan untuk balita *stunting*.

2. Interpretasi

Interpretasi adalah upaya menjelaskan kebijakan kepada pelaksana dan kelompok sasaran dengan bahasa yang mudah dipahami, agar mereka mengerti maksud, tata cara pelaksanaan, dan aturan kebijakan (Nurkholilah, 2021). Menurut Jones (1984), interpretasi adalah menafsirkan program menjadi rencana yang dapat diterima dan dijalankan, serta

memastikan pelaksanaan sesuai petunjuk teknis dari pejabat berwenang (Suryana, 2009). Pelaksana kebijakan harus memahami makna dan tujuan kebijakan untuk menghindari penafsiran yang menyimpang (Wiguna, Jati, & Kusumastuti, 2021).

Edward III (1980) menekankan pentingnya komunikasi dalam implementasi kebijakan, agar pelaksana tahu apa yang harus dilakukan dan dapat menjelaskan dengan baik kepada kelompok sasaran, mengurangi penyimpangan dalam implementasi. Di Kelurahan Kedung Baruk, interpretasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2022, dilakukan melalui rembuk *stunting* dan FGD untuk membangun komunikasi dan konsistensi pelaksanaan kebijakan.

Komunikasi antar pelaksana kebijakan dilakukan melalui FGD untuk mengurangi perbedaan pendapat dan meningkatkan rasa tanggung jawab (Van Meter & Van Carl, 1975). Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan tentang *stunting* juga dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada tim dan masyarakat. Namun, sosialisasi belum menjangkau semua lapisan masyarakat, menyebabkan rendahnya pengetahuan tentang *stunting*.

Kesadaran tentang pencegahan *stunting* harus dimiliki oleh tim dan masyarakat, karena masyarakat berperan dalam pola gizi harian. Meskipun sosialisasi dilakukan, beberapa anggota tim masih belum paham tentang *stunting* dan cara pencegahannya, menghambat percepatan penurunan *stunting* di Kelurahan Kedung Baruk (Fahzira, 2020; Jones, 1984).

Secara keseluruhan tahapan interpretasi yang dilakukan Kelurahan Kedung Baruk masih belum maksimal karena masih terdapat anggota tim yang masih belum paham mengenai *stunting* dan cara penurunannya. Hal tersebut menghambat proses percepatan penurunan *stunting*. Implementasi sangat membutuhkan penjelasan dan pemahaman yang dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaksana dan sasaran kebijakan. Apabila masyarakat dan pelaksana kebijakan tidak paham tentang maksud dari kebijakan tersebut maka implementasi kebijakan dapat terhambat. Oleh karena itu, perlu dilakukannya sosialisasi dan penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman tentang *stunting* oleh dinas dan pihak terkait agar pelaksana kebijakan tingkat bawah atau Kelurahan Kedung Baruk dapat menjalankan implementasi kebijakan dengan baik.

3. Aplikasi atau Penerapan

Penerapan kebijakan adalah kegiatan dan upaya melaksanakan atau merealisasikan kebijakan sesuai dengan rencana, pedoman, standar, dan tujuan yang diinginkan (Nurkholilah, 2021). Menurut Jones (1984), penerapan mencakup ketentuan rutin dari pelayanan yang disesuaikan dengan tujuan dan perlengkapan program. Prosedur kerja, program kerja, dan jadwal kegiatan harus jelas untuk memastikan pelaksanaan sesuai petunjuk teknis (Suryana, 2009).

Van Meter dan Van Horn (1975) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan mengubah keputusan menjadi kegiatan operasional dalam periode tertentu untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Di Kelurahan Kedung Baruk, kegiatan posyandu, kunjungan pendampingan keluarga, kelas balita *stunting*, kelas parenting, dan sosialisasi dilakukan sebagai upaya percepatan penurunan dan pemantauan kesehatan gizi balita.

Jones (dalam Wiguna, 2021) menegaskan bahwa penerapan kebijakan harus dilakukan secara rutin sesuai keputusan dan peraturan yang telah dibuat. Pedoman program dan patokan harus digunakan untuk mencapai tujuan kebijakan yang diinginkan. Sesuai Peraturan Walikota Surabaya Nomor 188.45/202/436.9.18.2/2022, kegiatan percepatan penurunan *stunting* dimonitor oleh TPPS Kecamatan dua kali setahun. TPPS Kelurahan

Kedung Baruk melaporkan penyelenggaraan kegiatan tersebut ke Kecamatan Rungkut, menyampaikan perkembangan prevalensi *stunting* dan kegiatan yang dilakukan selama enam bulan terakhir, serta bantuan dari pemerintah kota dan dinas terkait. Monitoring menunjukkan penurunan angka balita *stunting* di Kelurahan Kedung Baruk.

Kegiatan Penurunan *Stunting*

Di Kelurahan Kedung Baruk, kegiatan posyandu dilakukan sebulan sekali untuk penimbangan berat dan tinggi badan balita, imunisasi, serta pemberian vitamin A. Posyandu berperan dalam tindakan preventif pencegahan *stunting* melalui pengukuran antropometri dan penyuluhan mengenai kesehatan gizi. Kelurahan Kedung Baruk juga fokus pada periode kritis 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), meliputi masa kehamilan, menyusui, hingga anak berumur 23 bulan. Penelitian menunjukkan bahwa *stunting* pada periode ini dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena berdampak pada perkembangan kognitif, intelektual, dan motorik anak (Mudi, Turtiantoro, & Dewi, 2021). Kelas ibu hamil diadakan secara rutin di Poskeskel untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman ibu tentang *stunting* dan cara pencegahannya.

Sosialisasi dan Edukasi, TPSS Kelurahan Kedung Baruk menyelenggarakan sosialisasi dan penyuluhan tentang percepatan penurunan *stunting* dengan menghadirkan narasumber ahli. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman tentang *stunting* dan cara pencegahannya. Edukasi diberikan agar masyarakat tidak menganggap *stunting* sebagai penyakit keturunan yang tidak bisa disembuhkan. Sosialisasi menekankan pentingnya pola asuh, kebersihan, dan konsumsi makanan bergizi, serta memanfaatkan sumber makanan lokal untuk meminimalisir biaya.

Penerapan kegiatan percepatan penurunan *stunting* di Kelurahan Kedung Baruk tidak disertai dengan pengetahuan mengenai petunjuk teknis dan pedoman kinerja. Petunjuk teknis dan pedoman kinerja merupakan sesuatu yang penting dalam implementasi kebijakan karena hal tersebut dijadikan acuan dalam menjalankan program kegiatan. Kurangnya pengetahuan akan petunjuk teknis dan pedoman kinerja akan menghambat proses implementasi kebijakan. Kelurahan Kedung Baruk tidak memiliki pedoman kinerja dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh TPSS Kelurahan Kedung Baruk atau Lurah Kedung Baruk yang secara khusus mengatur proses implementasi kebijakan penurunan *stunting*. Kelurahan Kedung Baruk dalam menjalankan semua program atau kegiatan berdasarkan arahan dari Pemerintah Kota Surabaya. Arahan tersebut merupakan pedoman kinerja dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk percepatan penurunan *stunting* di tingkat kelurahan. Ketidaktahuan akan pedoman kinerja dan petunjuk teknis menyebabkan anggota TPSS Kelurahan Kedung Baruk tidak mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan dan bagaimana peran mereka dalam percepatan penurunan *stunting*.

Tahap penerapan dalam implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kelurahan Kedung Baruk telah berjalan dengan baik namun masih terdapat indikator yang belum terpenuhi. Penerapan tersebut berjalan dengan baik terlihat dari kegiatan posyandu yang telah berjalan secara rutin, kunjungan pendampingan keluarga, kelas balita *stunting*, kelas ibu hamil dan kegiatan sosialisasi. Namun dalam penerapan tersebut anggota Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPSS) Kelurahan Kedung Baruk belum mengetahui adanya pedoman kinerja dan petunjuk teknis dalam melakukan dan menyusun kegiatan percepatan penurunan *stunting*.

Implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kelurahan Kedung Baruk Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya masih belum berjalan dengan baik jika dilihat dari tiga pilar keberhasilan implementasi kebijakan menurut Jones (1984). Kelurahan Kedung Baruk telah memiliki Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPSS), namun

beberapa anggota tim yang belum aktif terlibat dalam kegiatan percepatan penurunan *stunting* di Kelurahan Kedung Baruk. Hal tersebut menyebabkan kurang pemahaman terhadap masing-masing tugas dan tupoksi kinerja dalam percepatan penurunan *stunting*. Permasalahan *stunting* dinilai sebagai masalah kesehatan yang ditangani oleh bidang kesehatan, padahal permasalahan *stunting* harus diselesaikan dengan melibatkan beberapa pihak terkait. Hal tersebut karena bukan hanya disebabkan oleh gizi yang dikonsumsi tetapi juga pola asuh, penanganan penurunan *stunting* dilakukan dengan dua intervensi yaitu kegiatan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi intensif yang memerlukan peranan pihak-pihak lain yang telah ditentukan dalam tim percepatan penurunan *stunting*.

Pemahaman tentang *stunting* dari pihak pelaksana kebijakan dan masyarakat yang masih rendah. Berbagai kegiatan percepatan penurunan *stunting* telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang tersedia. Namun dalam penerapan tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kelurahan Kedung Baruk, belum mengetahui adanya pedoman kinerja dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam mengatur percepatan penurunan *stunting* di tingkat Kelurahan Kedung Baruk. Hal tersebut menyebabkan anggota tim tidak mengetahui apa yang harus mereka kerjakan.

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kelurahan Kedung Baruk

1. Faktor Pendukung:

Kader Surabaya Hebat (KSH): KSH aktif dalam monitoring dan memfasilitasi penurunan *stunting*. Terdapat 10 KSH di Kelurahan Kedung Baruk yang berperan dalam administrasi, pengumpulan data, pemetaan kelompok sasaran, serta pelaksanaan kegiatan terkait *stunting*. KSH juga aktif mengajak masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan posyandu dan berkoordinasi dengan bidan, kader posyandu, dan aparat kelurahan.

Bantuan Susu dan Vitamin dari Puskesmas Kalirungkut: Program perbaikan gizi masyarakat melalui pemberian makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil dan balita. Bantuan susu dan vitamin dari TPPS Kelurahan Kedung Baruk menggunakan anggaran dana kelurahan. Bantuan ini membantu keluarga balita *stunting* dengan ekonomi rendah dalam meningkatkan gizi anak.

Ketersediaan Alat Pendukung: Tersedia fasilitas seperti laptop, tablet, kuota internet, alat pengukur, dan timbangan untuk kegiatan posyandu. Fasilitas ini mempermudah pelaporan dan administrasi kegiatan percepatan penurunan *stunting*.

2. Faktor Penghambat:

Keterbatasan Pengetahuan Masyarakat tentang *Stunting*: Masyarakat masih kurang paham tentang *stunting*, menganggapnya sebagai penyakit keturunan, dan tidak tahu cara mengatasi. Pola asuh dan pola makan yang buruk mempengaruhi kondisi balita. Sosialisasi dan penyuluhan tentang *stunting* belum menyeluruh dan masih terkesan kaku.

Keterbatasan Anggaran Dana: Dana kegiatan percepatan penurunan *stunting* menggunakan APBD dan dana desa/kelurahan yang terbatas. Anggaran terbatas mempengaruhi jumlah dan frekuensi bantuan makanan tambahan, susu, dan vitamin. Keterbatasan dana menyebabkan tidak semua sasaran masyarakat dapat menerima bantuan.

Pedoman Kinerja dan Petunjuk Teknis: Tidak adanya pedoman, petunjuk teknis, dan prosedur kinerja yang jelas untuk percepatan penurunan *stunting*. Pemerintah kelurahan hanya mengikuti arahan dari pemkot Surabaya tanpa pedoman kinerja khusus untuk TPPS Kelurahan Kedung Baruk.

Faktor pendukung dan penghambat ini harus dikelola dengan baik untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kelurahan Kedung Baruk.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan di lapangan, peneliti menarik kesimpulan akhir dalam implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya masih belum berjalan dengan baik dan optimal. Hal tersebut diperkuat dengan temuan peneliti bahwa persentase prevalensi *stunting* Kelurahan Kedung Baruk mengalami penurunan, pada tahun 2021 sebanyak 23 balita mengalami *stunting* dan tahun 2023 menjadi 8 balita yang mengalami *stunting*, penurunan angka *stunting* tersebut kebanyakan karena lulus umur. Berdasarkan temuan yang didapatkan dilapangan dalam pilar organisasi, anggota Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kelurahan Kedung Baruk masih belum terlibat aktif dalam percepatan penurunan *stunting*. Hal tersebut terjadi karena tidak ada standar operasional prosedur (SOP) dan pedoman kinerja serta adanya rangkap jabatan dalam percepatan penurunan *stunting*. Interpretasi percepatan penurunan *stunting* yang dilakukan oleh Kelurahan Kedung Baruk telah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kota Surabaya. Namun belum dilaksanakan secara menyeluruh sehingga pemahaman masyarakat tentang *stunting* masih rendah. Selain itu, dalam menerapkan kebijakan percepatan penurunan *stunting* Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kelurahan Kedung Baruk belum mengetahui tentang pedoman kinerja dan petunjuk teknis yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan *stunting*.

Kelurahan Kedung Baruk didukung dengan Kader Surabaya Hebat(KSH) yang aktif dalam percepatan penurunan *stunting* dan bantuan makanan tambahan dari Puskesmas Kalirungkut serta dengan ketersediaan alat pendukung dalam kegiatan posyandu. Namun masyarakat Kedung Baruk masih memiliki keterbatasan pengetahuan tentang *stunting*, keterbatasan anggaran dana/kelurahan, kurangnya pengetahuan anggota tim percepatan penurunan *stunting* tentang pedoman dan prosedur kinerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Hutri. Purwo Widodo, E. R. (2022). *Analisis Implementasi Kebijakan Sosial Pencegahan Stunting Pendahuluan Percepatan penanganan stunting pada tahun 2020 diperpanjang dari 160 kabupaten dan oleh kekurangan gizi yang menetap , terutama pada 1 . 000 hari pertama kehidupan (HPK). gangguan kr. 8090, 241–252.* <https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v8i2.22558>
- Besin, M. I. B. (2023). *Optimalisasi Program Penanganan Stunting Di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur.* 1–9. [http://eprints.ipdn.ac.id/13566/%0Ahttp://eprints.ipdn.ac.id/13566/1/MARIA INTAN BERE BESIN-30.1144-OPTIMALISASI PROGRAM PENANGANAN STUNTING DI KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR-.pdf](http://eprints.ipdn.ac.id/13566/%0Ahttp://eprints.ipdn.ac.id/13566/1/MARIA%20INTAN%20BERE%20BESIN-30.1144-OPTIMALISASI%20PROGRAM%20PENANGANAN%20STUNTING%20DI%20KABUPATEN%20BELU%20PROVINSI%20NUSA%20TENGGARA%20TIMUR-.pdf)
- Dafiriadi. (2021). Implementasi Program Penanggulangan Stunting Di Dinas Kesehatan Kabupaten Bone. *Skripsi*, 4(1), 1–23.
- Heri, H. L. W. (2023). *Implementasi Program Pencegahan Stunting Pemerintah Desa Sakra Selatan Dalam Upaya Menurunkan Prevalensi Stunting.* [http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/34796%0Ahttp://eprints.unram.ac.id/34796/2/Jurnal Onoq.pdf](http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/34796%0Ahttp://eprints.unram.ac.id/34796/2/Jurnal%20Onoq.pdf)

- Hidayati, A., Agushybana, F., & Sriatmi, A. (2022). Analisis Pelaksanaan Program Bina Keluarga Balita Pada Era Pandemi Covid-19 Di Lokus Desa Stunting Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. *JKM (Jurnal Kesehatan Masyarakat) Cendekia Utama*, 10(2), 269. <https://doi.org/10.31596/jkm.v10i2.1230>
- PEMERINTAH KOTA SURABAYA. (n.d.). TANGANI STUNTING DAN CEGAH KEMATIAN IBU, WALI KOTA ERI RANCANG PROGRAM DARI HULU HINGGA HILIR. PEMERINTAH KOTA SURABAYA. <https://surabaya.go.id/id/berita/64403/tangani-stunting-dan-cegah-kema>
- Permatasari, M. A., & Eprilianto, D. F. (2023). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Mencapai Zero Stunting di Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya. *Publika*, 11(4), 2637–2650.
- Sahroji, Q. N., Hidayat, R., & Nababan, R. (2022). Implementasi Kebijakan Dinas Kesehatan Dalam Penanganan Stunting Di Kabupaten Karawang. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7(1), 34–39. <https://doi.org/10.36982/jpg.v7i1.1983>
- Wusqa Abidin, U. ., Permatasari, R., & Stefani, Y. (2023). ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN STUNTING DI PUSKESMAS MAMASA. 5. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35329/jp.v5i1.3605>
- Yeni, D. I., Wulandari, H., & Hadiati, E. (2020). Pelaksanaan Program Pemberian Makanan Sehat Anak Usia Dini : Studi Evaluasi Program CIPP. *Murhum : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 1–15. <https://doi.org/10.37985/murhum.v1i2.9>
- Zulaikha, Y. Windusari, Y. Idris, H. (2021). Analisis Pelaksanaan Program Pencegahan Stunting. 10, 6. <https://doi.org/10.31539/jks.v5i1.3007>